BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya diatas pada skripsi ini yang mana penelitiannya terkait dengan pokok permasalahan pertama dan kedua maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT.Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi ada yang belum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia yang mana menentukan bahwa untuk melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa putusan pengadilan yaitu benda yang dijadikan objek jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan, dan akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang tidak didaftarkan tersebut tidak sah secara hukum dikarenakan objek jaminan pada lembaga pembiayaan PT.Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi tidak dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi oleh PT.Batavia Prosperindo Finance Cabang Jambi yaitu:
 - a. Faktor dari pihak Kreditur yakni bahwasanya pihak kreditur mengalami kesulitan saat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena pihak debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut

dengan sukarela. Dan pihak kreditur sendiri tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi terjadi permasalahan hukum yakni tidak sahnya pelaksanaan eksekusi objek jaminan dalam perjanjian tersebut yang tidak didaftarkan.

- b. Faktor dari pihak debitur yakni bahwasanya pihak debitur mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kredit sehingga menyebabkan wanprestasi oleh karena itu pihak kreditur melaksanakan kewajibannya untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut dan debitur tidak beritikad baik untuk memberikan objek jaminan tersebut karena debitur masih merasa mampu untuk melaksanakan kewajibannya.

B. Saran

Terkait dengan yang dibahas pada pokok permasalahan dalam penelitian ini yang mana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan saran bagi para pihak yang berkepentingan sebagai berikut: hendaknya bagi Pihak Kreditur untuk melakukan pendaftaran benda yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, agar mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum serta terpenuhi asas publisitas bagi pihak kreditur itu sendiri.

Kemudian bagi Pihak Debitur untuk lebih mengetahui mengenai Jaminan Fidusia itu sendiri agar dapat berhati-hati dan mengetahui apabila debitur itu sendiri melakukan wanprestasi dan akan dilaksanakannya eksekusi

objek jaminan fidusia, debitur dapat mengetahui sah atau tidak sahnya pelaksanaan eksekusi tersebut.

Untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diperlukan penyempurnaan terhadap batas waktu untuk mendaftarkan benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia dan sanksi apabila tidak dilaksanakan pendaftaran benda jaminan tersebut.